

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN 806 & 8012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>PENGUATAN INFRASTRUKTUR KELEMBAGAAN DALAM MENDORONG TRANSPARANSI, PARTISIPASI PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								
<b>Penguatan Infrastruktur Transparansi Badan Publik</b>								
1	Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik Pada Kementerian / Lembaga	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat		Implementasi publikasi layanan Informasi Bidang Koordinasi Kesra.	Th. 2014 a. Terbit dan terpublikasinya SOP Layanan Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik Kemenko Kesra pada situs Kemenko Kesra b. Tersedianya informasi publik sesuai Daftar Informasi Publik pada situs Kemenko Kesra c. Terlaksananya dan dipublikasinya hasil evaluasi pemanfaatan informasi publik pada situs Kemenko Kesra. Th. 2015 a. Tersedianya informasi publik secara berkala sesuai dengan Daftar Informasi Publik pada situs Kemenko Kesra. b. Terlaksananya dan dipublikasinya hasil evaluasi pemanfaatan informasi publik pada situs Kemenko Kesra.	806 (2014): Diterbitkannya dan dipublikasinya SOP layanan informasi publik pada situs Kemenko Kesra. 812 (2014): a. Terbit dan terpublikasinya Daftar Informasi Publik Kemenko Kesra pada situs Kemenko Kesra b. Tersedianya informasi publik yang sesuai dengan Daftar Informasi Publik pada situs Kemenko Kesra c. Terlaksananya dan dipublikasinya hasil evaluasi pemanfaatan informasi publik pada situs Kemenko Kesra.		Kelanjutan renaksi OGI tahun 2013, beberapa informasi telah tersedia dalam website dan diupayakan mendorong kelengkapan dan update
<b>Penguatan Infrastruktur Komisi Informasi Pusat dan Daerah</b>								
2	Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan Pengelolaan Tupoksi Komisi Informasi sesuai UU KIP	Komis Informasi Pusat	Kementerian Dalam Negeri	Terbentuknya Komisi Informasi Daerah di seluruh provinsi sebagaimana UU No.14 tahun 2008	Th. 2014 Terbentuknya Komisi Informasi Daerah di 24 Provinsi Th. 2015 Terbentuknya Komisi Informasi Daerah di 27 Provinsi	806 (2014): Terlaksananya fasilitasi dan advokasi dalam rangka pembentukan Komisi Informasi Daerah. 812 (2014): Terbentuknya Komisi Informasi Daerah di 24 Provinsi		
3				Implementasi ketentuan/pedoman teknis menyangkut perlindungan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi	Th. 2014 Diterbitkannya ketentuan/panduan Komisi Informasi Pusat mengatur kriteria pemohon informasi Th. 2015 Terlaksananya ketentuan/panduan Komisi Informasi Pusat mengatur kriteria pemohon informasi di seluruh Komisi Informasi Provinsi	806 (2014): Terlaksananya pembahasan perumusan ketentuan/panduan Komisi Informasi Pusat menyangkut kriteria pemohon informasi 812 (2014): Diterbitkannya ketentuan/panduan Komisi Informasi Pusat mengatur kriteria pemohon informasi		
4				Pelaksanaan revisi UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Th. 2014 Terlaksananya kajian revisi UU KIP Th. 2015 a. Diterbitkannya revisi UU KIP b. Diterbitkannya peraturan turunan atas revisi UU KIP c. Diterbitkannya peraturan tentang mekanisme sidang di luar kantor KI untuk memudahkan pemohon yang tempat tinggalnya jauh dari kantor KI	806 (2014): Tersusunnya rencana perumusan kajian dalam rangka revisi UU KIP 812 (2014): Terlaksananya kajian revisi UU KIP		
<b>Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan SDM Pelayanan Publik</b>								
5	Penguatan Infrastruktur Mekanisme Penyelenggaraan Layanan Publik yang menganut prinsip Transparansi dan Partisipasi Publik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian/Lembaga	Penerbitan dan publikasi SOP layanan publik dan <b>Standard</b> Pelayanan (SP) layanan publik.	Th. 2014 75% K/L sudah menghasilkan dan mempublikasikan SOP dan SP layanan publik. Th. 2015 100% K/L sudah menghasilkan dan mempublikasikan SOP dan SP layanan publik.	806 (2014): Tersusunnya rencana dan strategi dalam rangka penerbitan dan publikasi SOP dan SP di K/L. 812 (2014): 75% K/L sudah menghasilkan dan mempublikasikan SOP dan SP layanan publik.		
6				Implementasi layanan publik SOP dan SP layanan publik yang penyusunannya melibatkan masyarakat.	Th. 2014 a. Menerbitkan surat edaran Menteri PAN RB untuk melibatkan publik dalam perumusan SOP dan SP di masing-masing pos pelayanan publik. b. Terlaksananya pilot project di 5 K/L dalam pembuatan SOP dan SP di sektor perdagangan, perindustrian, dan kehutanan yang melibatkan publik Th. 2015 a. Diterbitkannya SOP dan SP (memasukkan klausul keterlibatan masyarakat) di lingkup layanan penerbitan izin usaha di sektor perdagangan, industri, dan kehutanan. b. Terlaksananya pembuatan SOP dan SP yang melibatkan publik di lingkup 20 K/L	806 (2014): Tersusunnya strategi keterlibatan publik dalam pembuatan SOP dan SP di lingkup 5 K/L. 812 (2014): a. Menerbitkan surat edaran Menteri PAN RB untuk melibatkan publik dalam perumusan SOP dan SP di masing-masing pos pelayanan publik. b. Terlaksananya pilot project di 5 K/L dalam pembuatan SOP dan SP di sektor perdagangan, perindustrian, dan kehutanan yang melibatkan publik		
7	Pengembangan partisipasi publik melalui optimalisasi media pengaduan masyarakat	UKP4		Tersedianya saluran pengaduan masyarakat menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah disertai mekanisme tindak lanjut yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah	Th. 2014 Terhubung dan termanfaatkannya aplikasi LAPOR sebagai media pengaduan publik di 25 Pemprov/Pemkab/Pemkot Th. 2015 Terhubung dan termanfaatkannya aplikasi LAPOR sebagai media pengaduan publik di 25 Pemprov/Pemkab/Pemkot	806 (2014): Terhubung dan termanfaatkannya aplikasi LAPOR sebagai media pengaduan publik di 5 Pemprov/Pemkab/Pemkot 812 (2014): Terhubung dan termanfaatkannya aplikasi LAPOR sebagai media pengaduan publik di 25 Pemprov/Pemkab/Pemkot		
8	Publikasi data bersifat satu atap melalui sistem Portal Open Data	UKP4		Pembuatan dan pengembangan sistem Portal Open Data yang berfungsi dalam menyediakan layanan satu atap untuk publikasi data oleh pemerintah dan konsumsi data oleh publik.	Th. 2014 a. Terbangunnya sistem portal Open Data yang terintegrasi di 20 K/L. b. Tersusunnya strategi pemanfaatan portal Open Data oleh masyarakat. c. Evaluasi pemanfaatan Open Data oleh publik di 20 K/L. Th. 2015 a. Terbangunnya sistem portal Open Data yang terintegrasi di 20 K/L b. Evaluasi pemanfaatan Open Data oleh publik di 20 K/L.	806 (2014): Telah beroperasinya website portal data Indonesia 812 (2014): a. Terbangunnya sistem portal Open Data yang terintegrasi di 20 K/L. b. Tersusunnya strategi pemanfaatan portal Open Data oleh masyarakat. c. Evaluasi pemanfaatan Open Data oleh publik di 20 K/L.		
9	Mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kualitas layanan publik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Ombudsman RI	Penerbitan ketentuan PP/Perpres menyangkut mekanisme penyampaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Th. 2014 a. Terselenggaranya infrastruktur pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi di 4 provinsi/kabupaten/kota sebagai Pilot Project b. Terlaksananya pilot project integrasi pengaduan pelayanan publik di 4 provinsi/kabupaten/kota c. Evaluasi pemanfaatan pengaduan pelayanan publik oleh masyarakat di pilot project tersebut. Th. 2015 a. Terselenggaranya infrastruktur pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi di 50 provinsi/kabupaten/kota sebagai Pilot Project b. Terlaksananya pilot project integrasi pengaduan pelayanan publik di 50 provinsi/kabupaten/kota c. Evaluasi pemanfaatan pengaduan pelayanan publik oleh masyarakat di pilot project tersebut.	806 (2014): Telah beroperasinya infrastruktur pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi di 2 provinsi/kabupaten/kota. 812 (2014): a. Terselenggaranya infrastruktur pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi di 4 provinsi/kabupaten/kota sebagai Pilot Project b. Terlaksananya pilot project integrasi pengaduan pelayanan publik di 4 provinsi/kabupaten/kota c. Evaluasi pemanfaatan pengaduan pelayanan publik oleh masyarakat di pilot project tersebut.		Program berjalan di KemenPAN RB
10	Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendorong kepuasan publik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Ombudsman RI	Pelaksanaan monitoring kualitas pelayanan publik melalui mekanisme pemeringkatan kualitas layanan	Th. 2014 a. Terselenggaranya kompetisi inovasi layanan publik b. Tersusunnya strategi publikasi hasil kompetisi SINOVIK ke masyarakat. b. Terpublikasinya informasi kompetisi inovasi layanan publik SINOVIK. Th. 2015 a. Terselenggaranya kompetisi inovasi layanan publik SINOVIK 2015. b. Terjadinya replikasi hasil kompetisi inovasi pelayanan publik SINOVIK tahun 2014 di 10 sektor pelayanan publik.	806 (2014): a. Terselenggaranya kompetisi inovasi layanan publik b. Tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan hasil kompetisi SINOVIK bagi badan publik pemerintah (pusat daerah) dan masyarakat. 812 (2014): Tersedianya komitmen 5 K/L/Pemprov/Pemkab/Pemkot untuk mereplikasi inovasi unggulan hasil kompetisi SINOVIK.		
11		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Keuangan	Penetapan besar alokasi anggaran didasarkan pada basis unit cost variabel SP	Th. 2014 Tersusunnya laporan penggunaan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SP oleh Pemerintah Pusat. Th. 2015 a. Tersusunnya strategi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penggunaan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SP oleh Pemerintah Daerah. b. Diterapkannya penggunaan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SP di 10 Pemerintah Daerah agar meningkat 5%	806 (2014): Tersusunnya strategi implementasi pemanfaatan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SP di Pemerintah Pusat 812 (2014): Tersusunnya laporan penggunaan unit cost dalam penyusunan anggaran berbasis SP oleh Pemerintah Pusat.		
12		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Dalam Negeri	Jumlah daerah yang telah melakukan penerbitan SP sebagai acuan kualitas pelaksanaan layanan publik	Th. 2014 70% Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab./Kota) yang menerbitkan Standar Pelayanan ( SP) Th. 2015 100% Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab./Kota) yang telah menyusun Standar Pelayanan ( SP)	806 (2014): Tersusunnya strategi implementasi dalam rangka mendorong penerbitan SP sebagai acuan kualitas pelayanan publik di Pemda 812 (2014): 70% Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab./Kota) yang menerbitkan Standar Pelayanan ( SP)		
<b>MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS TRANSPARANSI, PARTISIPASI PUBLIK DAN PELAYANAN DI AREA LAYANAN DASAR MASYARAKAT</b>								
<b>Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Kesehatan</b>								
13	Peningkatan kualitas pelayanan publik menyangkut penyediaan air bersih	Kementerian Pekerjaan Umum		Publikasi data penyediaan air minum dan air bersih	Th. 2014 a. Terciptanya strategi optimalisasi pemanfaatan informasi situs pamsimas.org oleh masyarakat b. Adanya peta geospasial lokasi implementasi pamsimas.org dan layanan ketersediaan air bersih dan layak minum.	806 (2014): Tersedianya publikasi peta geospasial implementasi pamsimas 812 (2014): a. Terciptanya strategi optimalisasi pemanfaatan informasi situs pamsimas.org oleh masyarakat b. Telah terintegrasinya peta geospasial lokasi implementasi pamsimas, dan layanan ketersediaan air bersih dan layak minum.		

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN 806 & 8012	% CAPAIAN	KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6	7	8
14	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Daerah yang memiliki dan mengoperasionalkan peran BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit).	Th. 2014 a. Meningkatnya jumlah BPRS di Kab/Kota sebanyak 10% Th. 2015 a. Meningkatnya jumlah BPRS di Kab/Kota sebanyak 20% dari tahun 2014.	806 (2014): Terciptanya strategi implementasi peningkatan jumlah BPRS di 3 provinsi. 812 (2014): Meningkatnya jumlah BPRS di Kab/Kota sebanyak 10%		
15	Pengembangan pelayanan publik yang terintegrasi.	Kementerian Kesehatan		Pengembangan dan implementasi sistem layanan publik, saluran informasi, aspirasi, dan pengaduan (SIAP Kementerian Kesehatan)	Th. 2014 a. Terciptanya strategi publikasi penggunaan SIAP, hotline 500567, SMS gateway, email, dan website SIAP Kemenkes b. Tersusunnya strategi integrasi pengaduan pelayanan kesehatan. c. Terimplementasinya komunikasi publik melalui SIAP sebanyak 200 permintaan informasi dan pengaduan (disampaikan pkl 16:00 s/d 08:00) per bulan. Th. 2015 a. Diimplementasikannya strategi integrasi pengaduan pelayanan kesehatan di seluruh UPT Kesehatan. b. Terintegrasikannya SIAP dengan LAPORI dan sosial media. c. Terimplementasinya komunikasi publik melalui SIAP sebanyak 300 permintaan informasi dan pengaduan (disampaikan pkl 16:00 s/d 08:00) per bulan.	806 (2014): Terciptanya mock up website SIAP Kementerian Kesehatan. 812 (2014): a. Terciptanya strategi publikasi penggunaan SIAP, hotline 500567, SMS gateway, email, dan website SIAP Kemenkes b. Tersusunnya strategi integrasi pengaduan pelayanan kesehatan. c. Terimplementasinya komunikasi publik melalui SIAP sebanyak 200 permintaan informasi dan pengaduan (disampaikan pkl 16:00 s/d 08:00) per bulan.		
16	Pengembangan infrastruktur pelayanan terintegrasi	Kementerian Kesehatan		Pengembangan sistem layanan darurat bagi publik	Th. 2014 a. Terbangunnya sistem Call Center 119 yang terintegrasi antara seluruh layanan ambulans/rumah sakit vertikal & daerah di 3 provinsi. b. Diluncurkannya layanan Call Center 119 untuk 3 provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat) antara rumah sakit vertikal & daerah. Th. 2015 a. Diluncurkannya layanan Call Center 119 di 8 provinsi. b. Terbangunnya sistem Call Center 119 yang terintegrasi dengan rumah sakit swasta, pemadam kebakaran, dan BNPB di Jabodetabek.	806 (2014): Terbangun strategi integrasi Call Center 119 di 3 provinsi. 812 (2014): a. Terbangunnya sistem Call Center 119 yang terintegrasi antara seluruh layanan ambulans/rumah sakit vertikal & daerah di 3 provinsi. b. Diluncurkannya layanan Call Center 119 untuk 3 provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat) antara rumah sakit vertikal & daerah.		
<b>Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pendidikan</b>								
17	Mendorong transparansi di lingkungan universitas/perguruan tinggi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Publikasi informasi pengelolaan keuangan PTN (Perguruan Tinggi Negeri).	Th. 2014 a. Peninjauan ulang peraturan menteri yang mewajibkan PTN melakukan transparansi pengelolaan keuangan melalui website (ringkasan) dan perpustakaan (laporan lengkap). b. Tersosialisasikannya peraturan menteri di seluruh PTN. c. Terlaksananya pilot project di 10 PTN. Th. 2015 a. Implementasi transparansi pengelolaan keuangan melalui website dan publikasi fisik di 50 PTN.	806 (2014): Terlaksananya peninjauan ulang peraturan menteri. 812 (2014): a. Peninjauan ulang peraturan menteri yang mewajibkan PTN melakukan transparansi pengelolaan keuangan melalui website (ringkasan) dan perpustakaan (laporan lengkap). b. Tersosialisasikannya peraturan menteri di seluruh PTN. c. Terlaksananya pilot project di 10 PTN.		
18				Peningkatan kualitas guru/dosen melalui pembelajaran secara online menggunakan video atau materi visual lain yang memudahkan pemahaman	Th. 2014 Tersedianya portal pooling materi pembelajaran guru/dosen dan 300 materi pembelajaran bersifat visual dari guru/dosen terbaik untuk di-upload dalam website agar bisa diakses guru/dosen. Th. 2015 Tersedianya 500 materi pembelajaran bersifat visual dari guru/dosen terbaik untuk di-upload dalam website agar bisa diakses guru/dosen.	806 (2014): a. Tersosialisasikan 2 portal untuk guru dan dosen. b. Terpublikasikannya 100 materi di portal materi. 812 (2014): Tersedianya portal pooling materi pembelajaran guru/dosen dan 300 materi pembelajaran bersifat visual dari guru/dosen terbaik untuk di-upload dalam website agar bisa diakses guru/dosen.		
19	Mendorong kegiatan riset dan kegiatan aplikasi teknologi terapan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		Pengembangan I-LAB-U (Integrated Laboratory University)	Th. 2014 a. Pengembangan informasi (website) I-LAB-U (Integrated Laboratory University) dalam bentuk portal informasi peralatan laboratorium (berikut aplikasi permohonan pemanfaatan alat lab) di Perguruan Tinggi. b. Diterbitkannya petunjuk teknis (juknis) pemanfaatan I-LAB-U bagi masyarakat. Th. 2015 a. Terkoneksinya I-LAB-U dengan 10 Perguruan Tinggi dan lembaga riset/industri.	806 (2014): Terbitnya draft petunjuk teknis (Juknis) menyangkut pemanfaatan I-LAB-U bagi masyarakat. 812 (2014): Terciptanya portal informasi peralatan laboratorium (berikut aplikasi permohonan pemanfaatan alat lab) di Perguruan Tinggi (I-LAB-U).		
<b>MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS TRANSPARANSI, PARTISIPASI PUBLIK DAN PELAYANAN DI AREA RAWAN KORUPSI</b>								
<b>Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Penegakan Hukum</b>								
20	Tindak lanjut penanganan laporan/pengaduan masyarakat	Kepolisian Negara Republik Indonesia		Transparansi proses penyelesaian pengaduan masyarakat.	Th. 2014 a. Adanya platform publikasi informasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan masyarakat b. Publikasi database pengelolaan kasus yang terolah (tetap melindungi identitas pelapor). Th. 2015 Adanya program kampanye publik tentang pengelolaan pengaduan kasus di Kompolnas dan Komjak.	806: a. Terpublikasinya data pengaduan masyarakat bulan Januari s.d Maret 2014 b. Terpublikasinya data pengaduan masyarakat bulan April s.d Juni 2014. 812: a. Terpublikasinya data pengaduan masyarakat bulan Juli s.d September 2014. b. Terpublikasinya data pengaduan masyarakat bulan Oktober s.d Desember 2014.		
21	Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kepolisian	Kepolisian Negara Republik Indonesia		Pengembangan sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara online	Th. 2014 Pengembangan SI-KATTON (Sistem Kartu Tanda Tilang dan Kehilangan Online) Th. 2015 Terimplementasinya SI-KATTON di 2 daerah percontohan	806 (2014): Terlaksananya rapat koordinasi bersama Mahkajapol. 812 (2014): Terlaksananya MoU bersama Mahkajapol.		
22				Penyederhanaan prosedur dan pelaksanaan layanan pengurusan SIM, STNK dan BPKB berkualitas secara online	Th. 2014 a. Terimplementasinya pelayanan SIM, STNK & BPKB secara online disertai informasi status untuk diimplementasikan di 10 Polda. b. Diterbitkannya ketentuan menyangkut keharusan pembayaran SIM, STNK & BPKB melalui bank yang informasinya dipublikasi via website c. Diterbitkannya ketentuan yang mengatur Sistem pelatihan dan pengujian di tempat yang telah diakui pemerintah. d. Tersusunnya evaluasi prosedur/mechanisme pembuatan SIM disertai rekomendasi Th. 2015 a. Terlaksananya pelayanan SIM, STNK & BPKB secara online disertai informasi status di 30 Polda b. Terlaksananya pembayaran SIM, STNK & BPKB melalui bank yang informasinya dipublikasi via website c. Terlaksananya Sistem pelatihan dan pengujian di tempat yang telah diakui pemerintah. d. Diterbitkannya regulasi penyederhanaan prosedur/mechanisme pembuatan SIM	806 (2014): a. Terimplementasinya pelayanan SIM secara online disertai informasi status identitas pemohon SIM untuk diimplementasikan di 4 Polda (Polda Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim) dan terlaksananya SOP pelayanan SIM, pelatihan asesor pengujian SIM dan sertifikasi pengujian SIM. b. Terimplementasinya pelayanan STNK dan BPKB secara online dan data ranmor secara online di 5 Polda (Polda Jabar, Banten, Jateng, DIY, dan Metro Jaya khusus STNK online) 812 (2014): a. Terimplementasinya pelayanan SIM secara online disertai informasi status identitas pemohon SIM untuk diimplementasikan di 3 Polda (Polda Maluku, Maluku dan Papua) dan terlaksananya SOP pelayanan SIM, pelatihan asesor pengujian SIM dan sertifikasi pengujian SIM. b. Terimplementasinya pelayanan STNK dan BPKB secara online dan data ranmor secara online di 3 Polda (Polda Jatim, Bali dan Kepri)		
23	Pengawasan pelayanan publik di bidang pengaturan arus lalu lintas			Pengawasan pelayanan publik kepolisian oleh publik melalui CCTV	Th. 2014 Publikasi rekaman CCTV di pelayanan publik di 1 Polda dalam website Th. 2015 Publikasi rekaman CCTV di pelayanan publik di 5 Polda dalam website	806 (2014): Tergelarnya sistem pengawasan dibidang pengaturan arus lalu lintas melalui cctv di 11 Polda (Polda Metro Jaya, Jateng, Jabar, Jatim, DIY, Bali, Sumsel, Riau, Jambi, Sumbar, dan Lampung). 812 (2014): Tergelarnya sistem pengawasan dibidang pengaturan arus lalu lintas melalui cctv di 6 Polda (Polda Kaltim, Sulsel, Kalbar, Kalsel, Sultra dan NTB).		
24	Pencegahan Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas	Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan Kementerian Kesehatan		Pembangunan sistem pendataan dan analisa kecelakaan lalu lintas terintegrasi (IRSMS), yang meliputi: 1. Data fatalitas kecelakaan secara detail (kendaraan, tipe kendaraan, lokasi, dll); 2. Traffic accident black spot; 3. Data kecelakaan terintegrasi dengan kementerian terkait; 4. Tersusunnya strategis planning pencegahan kecelakaan nasional antar instansi terkait.	Tahun 2014 Data kecelakaan tergelar di 11 Polda secara online (Polda Metro Jaya, Jateng, Jabar, Jatim, Banten, DIY, Sumut, Kalbar, Sulsel, Bali dan Riau). Tahun 2015 Data kecelakaan tergelar di 15 Polda secara online (Polda Sumbar, Sumsel, Lampung, Jambi, Aceh, Bengkulu, Babel, Kepri, Gorontalo, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sultra dan Sulteng).	806 (2014): Publikasi data kecelakaan secara online di 11 Polda (Polda Metro Jaya, Jateng, Jabar, Jatim, Banten, DIY, Sumut, Kalbar, Sulsel, Bali dan Riau.) 812 (2014): Sistem dapat diakses oleh Bappenas, Kemenhub, Kemen PU dan Kemenkes.		
<b>Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa</b>								
25	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	LKPP	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Implementasi black list berbasis perusahaan/personal yang berlaku secara nasional	Th. 2014 Adanya regulasi yang mengatur kewajiban untuk mempublikasikan daftar hitam Th. 2015 Publikasi daftar perusahaan dan personal yang di-black list	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja perumusan regulasi menyangkut publikasi daftar hitam 812 (2014): Terbitnya regulasi yang mengatur kewajiban untuk mempublikasikan daftar hitam		
<b>Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi</b>								
26	Peningkatan kualitas layanan perizinan usaha	BKPM		Pengembangan portal konsultasi perizinan usaha di PTSP yang dapat diakses secara online	Th. 2014 a. Sosialisasi IRU nasional. b. Terbangunnya sarana konsultasi layanan investasi (IRU) nasional yang terhubung dengan seluruh Provinsi. c. Tersusun dan terpublikasikannya laporan kinerja IRU pada tahun 2013 di website BKPM.	806 (2014): Terbitnya strategi dan rencana kerja implementasi IRU secara nasional. 812 (2014): a. Terbangunnya sarana konsultasi layanan investasi (IRU) nasional yang terhubung dengan seluruh Provinsi. b. Tersusun dan terpublikasikannya laporan kinerja IRU pada tahun 2013 di website BKPM.		

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06 & B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6	7	8
27	Pengembangan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).	Kementerian Perdagangan		1. Tersedianya data harga kebutuhan pokok di 33 Ibu Kota Provinsi. 2. Harga barang penting/strategis di 33 Ibu Kota Provinsi.	Th. 2014 a. Tersedianya data harga kebutuhan pokok/strategis yang valid, real time, dan berkelanjutan. b. Terpublikasinya harga masing-masing jenis kebutuhan pokok melalui website Kementerian Perdagangan dan website provinsi/kabupaten/kota. Th. 2015 Beroperasinya sistem informasi harga dan stock komoditas online dalam skala nasional.	B06 (2014): Terpublikasinya informasi harga masing-masing jenis kebutuhan pokok di website Kementerian Perdagangan. B12 (2014): a. Tersedianya data harga kebutuhan pokok/strategis yang valid, real time, dan berkelanjutan. b. Terpublikasinya harga masing-masing jenis kebutuhan pokok melalui website Kementerian Perdagangan dan website provinsi/kabupaten/kota.		
28	Penguatan peran swasta untuk membangun praktek kondusif dalam hal berinteraksi dengan pihak Pemerintah	Bappenas		Meningkatkan pemahaman sektor usaha baik BUMN/D dan asosiasi pengusaha menyangkut dampak buruk uang pelicin dalam bisnis dan ekonomi bangsa	Th. 2014 Tersusunnya laporan hasil kegiatan sosialisasi tentang uang pelicin sebagai bagian dari tipikor yang dilakukan oleh 5 BUMN Besar dan 3 asosiasi / Kamar Dagang, Kemendag, dan Kemenperind di nasional dan daerah Th. 2015 Tersusunnya rekomendasi substansi revisi UU Tipikor yang mengatur tentang korupsi di sektor swasta.	B06 (2014): Tersusunnya strategi dalam rangka mendorong pemahaman BUMN / BUMD serta asosiasi pengusaha menyangkut dampak buruk uang pelicin dalam bisnis dan kegiatan ekonomi B12 (2014): Tersusunnya laporan hasil kegiatan sosialisasi tentang uang pelicin sebagai bagian dari tipikor yang dilakukan oleh 5 BUMN Besar dan 3 asosiasi / Kamar Dagang, Kemendag, dan Kemenperind di nasional dan daerah		
29	Peningkatan kualitas layanan melalui otomasi di PTSP	Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara	Kementerian dalam negeri	Penerapan e-governance yang fokus pada pelayanan publik, efisiensi internal, dan networking pemerintah; serta memiliki visi yang jelas.	Th. 2014 Implementasi sistem pelayanan publik secara terotomasi Kantor Pelayanan Terpadu (PTSP) di 20 Pemprov dan 150 kab/Kota (Aplikasi Non SPIPSE) Th. 2015 Implementasi sistem pelayanan publik secara terotomasi Kantor Pelayanan Terpadu (PTSP) di 30 Pemprov dan 300 kab/Kota (Aplikasi Non SPIPSE)	B06 (2014): Tersusunnya rencana kerja implementasi otomasi layanan kantor PTSP di daerah B12 (2014): Implementasi sistem pelayanan publik secara terotomasi Kantor Pelayanan Terpadu (PTSP) di 20 Pemprov dan 150 kab/Kota (Aplikasi Non SPIPSE)		
30	Peningkatan peran pemuda dalam kegiatan pembangunan melalui implementasi PP 41 tahun 2011 dan PP 60 tahun 2013	Kementerian Koperasi dan UMKM	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Terselenggaranya pembinaan kewirausahaan bagi pemuda termasuk mahasiswa melalui beragam upaya pengembangan terintegrasi dan penyediaan fasilitas infrastruktur kewirausahaan.	Th. 2014 a. Tersusun dan terimplementasinya Strategi dan Roadmap rencana aksi pengembangan kewirausahaan piloting di 10 kabupaten/kota termasuk pembangunan portal informasi UMKM terintegrasi (pendirian usaha, pengembangan hingga pemasaran) b. Terbangunnya portal informasi Th. 2015 Terimplementasinya Strategi dan Roadmap rencana aksi pengembangan kewirausahaan piloting di 50 kabupaten/kota	B06 (2014): Tersusunnya draft strategi dan roadmap rencana aksi pengembangan kewirausahaan di daerah. B12 (2014): a. Tersusun dan terimplementasinya Strategi dan Roadmap rencana aksi pengembangan kewirausahaan piloting di 10 kabupaten/kota termasuk pembangunan portal informasi UMKM terintegrasi (pendirian usaha, pengembangan hingga pemasaran) b. Terbangunnya portal informasi		Usulan : Memberi edukasi pada masyarakat mengenai peluang wirausaha. Mendorong kegiatan kewirausahaan untuk mahasiswa. Mengadakan sekolah gratis bagi anak marginal PP 41/2011 Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. PP 60/2013 Orta Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Demaristah, menjadi jabatan
31	Peningkatan peran pemuda dalam rangka ikut lebih terlibat dalam pembangunan	Kementerian Pemuda dan Olah Raga		Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pembinaan bagi organisasi kepemudaan	Tahun 2014 a. Inventarisasi dan publikasi database komunitas pemuda mencakup berbagai bidang peminatan (serta informasi nomer contact yang dapat dihubungi) di 33 provinsi, dalam website www.kemepora.go.id b. Kolaborasi 10.000 pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program c. Membantu 140 Organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan Tahun 2015 Terlaksananya program pembinaan organisasi kepemudaan sebagai ajang pengembangan kreasi anggota, memudah kolaborasi antar organisasi, dan memiliki kemandirian secara lembaga di 33 provinsi.	B06 (2014): Tersusunnya strategi dan rencana aksi mendorong kolaborasi organisasi kepemudaan B12 (2014): a. Inventarisasi dan publikasi database komunitas pemuda mencakup berbagai bidang peminatan (serta informasi nomer contact yang dapat dihubungi) di 33 provinsi, dalam website www.kemepora.go.id b. Kolaborasi 10.000 pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program c. Membantu 140 organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan		
<b>Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pertanahan</b>								
32	Peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan pertanahan	Badan Pertanahan Negara		Implementasi Sistem Informasi Pertanahan agar dapat dimanfaatkan oleh publik baik melalui publikasi dalam website dan peningkatan kualitas layanan pertanahan	Th. 2014 Termanfaatkannya Sistem Pelayanan Informasi Pertanahan secara online oleh publik melalui website BPN untuk 5 jenis layanan: 1. Pengecekan Sertifikat 2. Peralihan Hak 3. Roya Tanggungan 4. Peningkatan Hak dari HGB ke HM 5. Hak Tanggungan Th. 2015 Termanfaatkannya Sistem Pelayanan Informasi Pertanahan secara online oleh publik melalui website BPN untuk 30 jenis layanan.	B06 (2014): a. Tersusunnya strategi dan rencana kerja optimalisasi pemanfaatan informasi BPN bagi masyarakat b. Terlaksananya publikasi 10 jenis layanan pertanahan BPN dalam portal satulayanan.net B12 (2014): Termanfaatkannya Sistem Pelayanan Informasi Pertanahan secara online oleh publik melalui website BPN untuk 5 jenis layanan: 1. Pengecekan Sertifikat 2. Peralihan Hak 3. Roya Tanggungan 4. Peningkatan Hak dari HGB ke HM 5. Hak Tanggungan		Peningkatan kualitas layanan pertanahan di pedesaan dan peningkatan pemahaman masyarakat menyangkut pertanahan
33				Peningkatan pemanfaatan data pertanahan melalui integrasi data dengan K/L terkait dan publikasi data pertanahan kepada publik	Th. 2014 Terlaksananya integrasi data pertanahan dengan 2 Kementerian/Lembaga/Pemda dan Publikasi pemetaan online melalui website BPN untuk lingkup area wilayah Jawa dan Bali Th. 2015 Terlaksananya integrasi data pertanahan dengan 3 Kementerian/Lembaga/Pemda dan Publikasi pemetaan online melalui website BPN untuk lingkup area wilayah Sumatera, Jawa dan Bali	B06 (2014): Tersusunnya strategi dan rencana pelaksanaan integrasi data pertanahan dengan 2 Kementerian/Lembaga/Pemda dan Publikasi pemetaan online melalui website BPN untuk lingkup area wilayah Jawa dan Bali B12 (2014): Terlaksananya integrasi data pertanahan dengan 2 Kementerian/Lembaga/Pemda dan Publikasi pemetaan online melalui website BPN untuk lingkup area wilayah Jawa dan Bali		
34	Mendorong investasi usaha melalui integrasi kebijakan dan regulasi mengenai pertanahan di Indonesia dalam bentuk satu dokumen	Badan Pertanahan Nasional		Transparansi informasi mengenai seluruh regulasi pertanahan yang disajikan dalam satu dokumen terintegrasi	Th. 2014 Diterbitkannya buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah 5 jenis layanan Th. 2015 Diterbitkannya buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah 10 jenis layanan	B06 (2014): Tersusunnya strategi dan rencana pelaksanaan penerbitan buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah 5 jenis layanan B12 (2014): Terbitnya buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah 5 jenis layanan		Tindak Lanjut Inpres 1/2013
<b>Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengelolaan TKI</b>								
35	Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik menyangkut pengelolaan TKI	BNP2TKI		Publikasi informasi pengiriman TKI menyangkut statistik pengiriman, kepelugan dan kasus yang terjadi dalam website	Th. 2014 Terpublikasinya secara online: 1. Data statistik tentang penempatan TKI berdasarkan negara. 2. Data kepelugan TKI 3. Data TKI bermasalah. 4. Informasi hal-hal yang harus dipersiapkan oleh TKI saat kepelugan dan proses tahapan yang harus dijalani saat kedatangan di bandara Indonesia. Th. 2015 Integrasi pelayanan (business process) secara online antara PPTKS dengan BNP2TKI (Pusat dan Daerah).	B06 (2014): Terlaksananya update seluruh data dalam website hingga tahun 2014. B12 (2014): Terpublikasinya secara online: 1. Data statistik tentang penempatan TKI berdasarkan negara. 2. Data kepelugan TKI 3. Data TKI bermasalah. 4. Informasi hal-hal yang harus dipersiapkan oleh TKI saat kepelugan dan proses tahapan yang harus dijalani saat kedatangan di bandara Indonesia.		
36				Publikasi informasi haji dan umroh, serta pelaporan setoran BPH	Th. 2014 Beroperasinya website jobsinfo.bnptki.go.id sebagai portal lowongan pekerjaan TKI di luar negeri yang menghubungkan antara supply side (PPTKS) dan calon TKI. Th. 2015 a. Terdapat 50 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di jobsinfo. b. Terdapat lebih dari 3.600 lowongan pekerjaan di jobsinfo.	B06 (2014): a. Terpublikasinya data statistik lowongan pekerjaan berdasarkan jenis jabatan & negara. b. Penggunaan Bahasa Indonesia secara menyeluruh di website jobsinfo.bnptki.go.id c. Terpublikasinya data pelamar pekerjaan untuk masing-masing lowongan pekerjaan. B12 (2014): Beroperasinya website jobsinfo.bnptki.go.id sebagai portal lowongan pekerjaan TKI di luar negeri yang menghubungkan antara supply side (PPTKS) dan calon TKI		
37				Terbentuknya perwakilan PPTKS di satu negara di luar negeri sebagai pemberi informasi layanan pengaduan, dan help desk bagi para TKI yang bekerja di luar negeri.	Th. 2014 a. Pemberian informasi dan sosialisasi dari BNP2TKI kepada para TKI (meliputi informasi layanan pengaduan, dan tindak lanjutnya) b. Publikasi laporan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan TKI yang diterima dalam website BNP2TKI. Th. 2015 a. Terbentuknya PPTKS di satu negara b. Publikasi laporan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan TKI yang diterima dalam website BNP2TKI	B06 (2014): Update data pengaduan dan tindak lanjut pengaduan TKI hingga tahun 2014. B12 (2014): Pemberian informasi dan sosialisasi dari BNP2TKI kepada para TKI (meliputi informasi layanan pengaduan, dan tindak lanjutnya)		
<b>Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengelolaan Haji</b>								
38	Pengelolaan haji yang dilakukan secara transparan dan akuntabel	Kementerian Agama		Publikasi informasi haji dan umroh, serta pelaporan setoran BPH	Th. 2014 Terpublikasinya informasi haji dan umroh di dalam website, diintegrasikan dengan Open Data/SIP PPID dan adanya pemaparan dalam bentuk infografis (penambahan informasi modul layanan). Th. 2015 Terpublikasinya informasi biaya haji yang berbasis peserta individual (pengelolaan setoran per 31 Desember 2015)	B06 (2014): Tersusunnya rencana kerja publikasi data dan informasi haji dan umrah termasuk publikasi dalam bentuk infografis di website Kementerian Agama B12 (2014): Terpublikasinya informasi haji dan umroh di dalam website, diintegrasikan dengan Open Data/SIP PPID dan adanya pemaparan dalam bentuk infografis (penambahan informasi modul layanan).		Kelanjutan renaksi th. 2013

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN 806 & 8012	% CAPAIAN	KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6	7	8
39	Mendorong transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA)	Kementerian Agama		a. Publikasinya informasi layanan pernikahan meliputi mekanisme/prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster dan juga website; serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali b. Terintegrasi dengan dukcapil.	Th. 2014 a. Terpublikasinya informasi layanan pernikahan meliputi prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster dan juga website; serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali b. Terkoneksinya simkah.bimaislam.com dengan dukcapil. c. Terimplementasinya simkah.bimaislam.com Th. 2015 a. Terpublikasinya informasi layanan pernikahan meliputi prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster dan juga website; serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara	806 (2014): Terpublikasinya informasi layanan pernikahan meliputi prosedur, biaya dan waktu layanan di website Kementerian Agama. 812 (2014): a. Terpublikasinya informasi layanan pernikahan meliputi prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster dan juga website; serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali b. Terkoneksinya simkah.bimaislam.com dengan dukcapil. c. Terimplementasinya simkah.bimaislam.com		
<b>Peningkatan Kualitas Transparansi, Partisipasi Publik dan Pelayanan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam</b>								
40	Transparansi pengelolaan Sumber Daya Alam dalam lingkup area ETI	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		Transparansi penerimaan sumber daya alam migas & pertambangan melalui ETI	Januari 2014 Terpublikasinya laporan hasil rekonsiliasi inisiatif transparansi industri ekstraktif (ETI) Indonesia dari sektor migas dan pertambangan untuk TA 2010, TA 2011. Th. 2015 Terpublikasinya laporan hasil rekonsiliasi inisiatif transparansi industri ekstraktif (ETI) Indonesia dari sektor migas dan pertambangan untuk TA 2012, TA 2013 sesuai dengan standar baru ETI 2013	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi laporan hasil rekonsiliasi inisiatif transparansi industri ekstraktif (ETI) Indonesia dari sektor migas dan pertambangan untuk TA 2010 & TA 2011. 812 (2014): Terpublikasinya laporan hasil rekonsiliasi inisiatif transparansi industri ekstraktif (ETI) Indonesia dari sektor migas dan pertambangan untuk TA 2010 & TA 2011.		
41	Transparansi pengelolaan Sumber Daya Alam dalam rangka mendukung akuntabilitas	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Transparansi informasi menyangkut Volume Produksi Sektor Ekstraktif (Migas dan Tambang), Kontrak migas (KKKS) dan mineral (KK, PKP2B dan IUP) serta pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dalam setiap tahapannya	Th. 2014 a. Adanya publikasi data produksi dan penerimaan migas maupun mineral dan batubara secara real time dan terklasifikasi menurut daerah penghasil dan unit produksi (unit kontrak/ijin) b. Adanya publikasi dokumen kontrak migas (KKKS) dan pertambangan (KK/PPK2B/IUP). Th. 2015 Adanya publikasi izin usaha pertambangan (IUP) di sektor mineral dan batubara secara terintegrasi di Pusat-Daerah termasuk publikasi proses pemberian izin usaha pertambangan dalam setiap tahapannya.	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi data produksi dan penerimaan migas maupun mineral dan batubara secara real time dan terklasifikasi menurut daerah penghasil dan unit produksi (unit kontrak/ijin) 812 (2014): a. Terpublikasinya data produksi dan penerimaan migas maupun mineral dan batubara secara real time dan terklasifikasi menurut daerah penghasil dan unit produksi (unit kontrak/ijin) b. Terpublikasinya dokumen kontrak migas (KKKS) dan pertambangan (KK/PPK2B/IUP).		
42		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Transparansi pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya (KK) dan PKP2B sesuai amanat UU Minerba serta pelaksanaan dan pengawasan hilirisasi pasca 13 Januari 2014	Th. 2014 a. Adanya publikasi perkembangan dan hasil renegotiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B - terkait pelaksanaan UU Minerba (No. 4/2009) b. Adanya publikasi perkembangan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian bahan tambang oleh industri/pertambangan per 12 Januari 2014 - terkait pelaksanaan UU Minerba (No. 4/2009) Th. 2015 Adanya mekanisme pengaduan dan pengawasan masyarakat terkait pelaksanaan hilirisasi	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi perkembangan dan hasil renegotiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B - terkait pelaksanaan UU Minerba (No. 4/2009) 812 (2014): a. Terpublikasinya perkembangan dan hasil renegotiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B - terkait pelaksanaan UU Minerba (No. 4/2009) b. Terpublikasinya perkembangan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian bahan tambang oleh industri/pertambangan per 12 Januari 2014 - terkait pelaksanaan UU Minerba (No. 4/2009)		
43		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Transparansi pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan mineral dalam setiap tahapannya	Th. 2014 Pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan mineral menggunakan sistem online (e-procurement) yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik dalam setiap tahapannya (50%) Th. 2015 a. Pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan mineral menggunakan sistem online (e-procurement) yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik dalam setiap tahapannya (50%) b. Adanya mekanisme pengadaan dan pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan mineral c. Adanya mekanisme whistleblower yang terintegrasi dengan LPSK dan KPK	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja untuk pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan mineral menggunakan sistem online (e-procurement) yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik dalam setiap tahapannya (50%) 812 (2014): Pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan mineral menggunakan sistem online (e-procurement) yang dapat diawasi perkembangannya oleh publik dalam setiap tahapannya (50%)		
44		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Transparansi informasi data spasial sektor ekstraktif	Th. 2014 Terpublikasinya informasi/data spasial untuk One Map Migas dan Mineral melalui situs Kementerian ESDM dengan data yang diperbaharui (up dated)	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi informasi/data spasial untuk One Map Migas dan Mineral melalui situs Kementerian ESDM dengan data yang diperbaharui (up dated) 812 (2014): Terpublikasinya informasi/data spasial untuk One Map Migas dan Mineral melalui situs Kementerian ESDM dengan data yang diperbaharui (up dated)		
45		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Transparansi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial (TJS) atau CSR di sektor migas dan Comdev/CSR di sektor mineral.	Th. 2014 Terpublikasinya dokumen terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR) KKKS Migas dan KK/IUP/PPK2B Minerba dalam setiap tahapannya (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban)	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi dokumen terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR) KKKS Migas dan KK/IUP/PPK2B Minerba dalam setiap tahapannya (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban) 812 (2014): Terpublikasinya dokumen terkait pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial (TJS/CSR) KKKS Migas dan KK/IUP/PPK2B Minerba dalam setiap tahapannya (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban)		
46		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Transparansi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dalam setiap tahapannya di sektor migas dan mineral, serta dana Jaminan Reklamasi (Minerba) dan ASR (Migas)	Th. 2014 Terpublikasinya dokumen terkait dengan reklamasi dan pasca tambang mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Termasuk di dalamnya informasi terkait besaran dan penggunaan dana Jaminan Reklamasi -Minerba- atau dana ASR -Migas-) Th. 2015 a. Terpublikasinya laporan hasil move pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Termasuk di dalamnya informasi terkait besaran dan penggunaan dana Jaminan Reklamasi -Minerba- atau dana ASR -Migas-) b. Adanya mekanisme pengaduan dan pengawasan masyarakat terkait pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi dokumen terkait dengan reklamasi dan pasca tambang mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Termasuk di dalamnya informasi terkait besaran dan penggunaan dana Jaminan Reklamasi -Minerba- atau dana ASR -Migas-) 812 (2014): Terpublikasinya dokumen terkait dengan reklamasi dan pasca tambang mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Termasuk di dalamnya informasi terkait besaran dan penggunaan dana Jaminan Reklamasi -Minerba- atau dana ASR -Migas-)		
47	Peningkatan kualitas pengawasan izin pengelolaan hasil hutan	Kementerian Kehutanan		Transparansi informasi menyangkut aktivitas pengelolaan sumber daya khususnya produk kehutanan	Th. 2014 a. Terpublikasinya data dan informasi produksi dan peredaran hasil hutan dan luran Hasil Hutan (PSDH & DR) b. Beroperasinya timber tracking system di 100 unit manajemen (perusahaan) Th. 2015 Terpublikasinya data dan informasi produksi dan peredaran hasil hutan, dan luran Hasil Hutan (PSDH & DR), serta beroperasinya timber tracking system di 120 unit manajemen (perusahaan)	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi data dan informasi produksi dan peredaran hasil hutan, dan luran Hasil Hutan (PSDH & DR) 812 (2014): a. Terpublikasinya data dan informasi produksi dan peredaran hasil hutan, dan luran Hasil Hutan (PSDH & DR) b. Beroperasinya timber tracking system di 100 unit manajemen (perusahaan)		Usulan : Pengadaan id card sebagai izin secara online yang berpusat di instansi kehutanan bagi para pelaku industri kayu yang berisikan data secara lengkap kayu tersebut dan tujuannya.
<b>MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS TRANSPARANSI, PARTISIPASI PUBLIK DAN PELAYANAN DI AREA MENADI PERHATIAN UTAMA PUBLIK</b>								
<b>Mendorong Partisipasi Publik dalam Perencanaan Kegiatan Pembangunan</b>								
48	Transparansi dan Partisipasi Publik dalam perumusan rencana pembangunan nasional dan daerah	Bappenas	Kementerian Dalam Negeri	Pengembangan metode perumusan rencana pembangunan nasional dan daerah yang mengutamakan partisipasi publik melalui pendekatan online dan offline	Th. 2014 Penerbitan peraturan menteri/acuan teknis perumusan rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif menggunakan metode online dan offline Th. 2015 Terimplementasinya metode perumusan rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif menggunakan metode online dan offline, <i>blotting</i> di 5 Kab/kota	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja penerbitan peraturan menteri/acuan teknis perumusan rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif menggunakan metode online dan offline 812 (2014): Terbitnya peraturan menteri/acuan teknis perumusan rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif menggunakan metode online dan offline		Usulan : FGD antara warga dan pemerintah secara online (dalam bentuk aplikasi multi-platform yang terkoneksi dengan SKPD, DPRD, Pemda) dan offline (FGD langsung di Taman Kota).
<b>Transparansi dan Partisipasi Publik di Lembaga DPR/DPD - DPRD</b>								
49	Peningkatan kinerja lembaga DPR-RI dan DPRD melalui publikasi informasi kepada publik	Sekretariat Jenderal DPR-RI		Publikasi informasi kelembagaan DPR-RI dan DPRD yang terintegrasi menyangkut informasi kelembagaan, tugas/fungsi, keanggotaan dan kegiatan melalui website yang terintegrasi	Th. 2014 Penyempurnaan website DPR-RI yang menginformasikan : Data kelembagaan (organisasi, tupoksi dan keanggotaan), <b>data absensi dan partisipasi anggota DPD/DPD pada setiap rapat yang berlangsung</b> , laporan mengenai jalannya rapat secara langsung, pengawasan produk legislasi, komentar publik mengenai rapat yang berlangsung, publikasi hasil sidang kepada publik. Th. 2015 Terintegrasinya website DPR-RI dengan DPRD di 5 Provinsi dan 50 Kab/Kota	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja publikasi beragam data dan informasi dalam website DPR-RI meliputi: Data kelembagaan (organisasi, tupoksi dan keanggotaan), <b>data absensi dan partisipasi anggota DPD/DPD pada setiap rapat yang berlangsung</b> , laporan mengenai jalannya rapat secara langsung, pengawasan produk legislasi, komentar publik mengenai rapat yang berlangsung, publikasi hasil sidang kepada publik. 812 (2014): Penyempurnaan website DPR-RI yang menginformasikan: 1. Data kelembagaan (organisasi, tupoksi dan keanggotaan). 2. Data absensi dan partisipasi anggota DPD/DPD pada setiap rapat yang berlangsung. 3. Laporan mengenai jalannya rapat secara langsung. 4. Pengawasan produk legislasi. 5. Komentar publik mengenai rapat yang berlangsung. 6. Publikasi hasil sidang kepada publik.		

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN 806 & 8012	% CAPAIAN	KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6	7	8
50	Mendorong transparansi dan akuntabilitas Lembaga DPR-RI	Sekretariat Jenderal DPR-RI		Publikasi informasi kelembagaan dan mekanisme kerja lembaga DPR-RI melalui websitenya	Th. 2014 a. Publikasi kriteria menyangkut penyelenggaraan rapat tertutup tersedia, dengan ruang lingkup yang ketat b. Diterbitkannya ketentuan baru menyangkut model pendokumentasian dan publikasi setiap pengambilan keputusan (termasuk dengan cara voting) yang menjamin kemudahan akses, berstandar, dan aktual)  Th. 2015 a. Terpublikasinya mekanisme pengolahan dan alur pergerakan dokumen dari sekretariat alat kelengkapan ke PPID, pengarsipan, dan manajemen www.dpr.go.id	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi informasi kelembagaan dan mekanisme kerja lembaga DPR-RI melalui websitenya  812 (2014): a. Terpublikasinya kriteria menyangkut penyelenggaraan rapat tertutup tersedia, dengan ruang lingkup yang ketat b. Terbitnya ketentuan baru menyangkut model pendokumentasian dan publikasi setiap pengambilan keputusan (termasuk dengan cara voting) yang menjamin kemudahan akses, berstandar, dan aktual)		Rencana aksi disesuaikan karena masuk dalam substansi RUU dan bukan mengawal disiplin proses perumusan RUU menggunakan prinsip Transparansi & Partisipasi Publik
51	Mendorong pemahaman Masyarakat atas haknya menyangkut dampak polusi / kerusakan lingkungan melalui informasi yang akurat dan tepat waktu.	Kementerian Lingkungan Hidup		Implementasi sistem pengumpulan dan publikasi informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara) dari industri dan fasilitas lainnya.	Tahun 2014 a. Diterbitkannya Pedoman KLH mengenai dokumen-dokumen yang wajib dibuka terkait pencemaran air dan udara, termasuk informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara) b. Diterbitkannya pedoman KLH mengenai sistem pengumpulan dan publikasi informasi tentang pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (air, tanah, udara) sesuai dengan konteks dan kesiapan Indonesia c. MoU KLH dengan 10 Perusahaan di Jakarta (Ciliwung) untuk membuka informasi mengenai pencemar yang dilepaskan ke media lingkungan; serta publikasi informasi secara jelas (dari KLH/BLH/Pemda) terkait Pilot Project di Serang, Banten. Informasi disampaikan secara interaktif di website KLH.	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja untuk publikasi implementasi sistem pengumpulan dan publikasi informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara) dari industri dan fasilitas lainnya.  812 (2014): a. Terbitnya Pedoman KLH mengenai dokumen-dokumen yang wajib dibuka terkait pencemaran air dan udara, termasuk informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (tanah, air, udara) b. Terbitnya pedoman KLH mengenai sistem pengumpulan dan publikasi informasi tentang pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan (air, tanah, udara) sesuai dengan konteks dan kesiapan Indonesia c. Terbitnya MoU KLH dengan 10 Perusahaan di Jakarta (Ciliwung) untuk membuka informasi mengenai pencemar yang dilepaskan ke media lingkungan; serta publikasi informasi secara jelas (dari KLH/BLH/Pemda) terkait Pilot Project di Serang, Banten. Informasi disampaikan secara interaktif di website KLH.		
52		Kementerian Lingkungan Hidup		Publikasi data pelepasan dan transfer kandungan polutan dari aktivitas industri yang dapat diakses setiap waktu, secara interaktif dalam format yang mudah dicerna masyarakat awam di 1 pilot project pencemaran air dan 1 pilot project pencemaran udara	Th 2015 a. Terlaksananya 1 pilot project keterbukaan informasi tentang pencemaran air dan 1 pilot project tentang pencemaran udara di daerah terdampak yang mempublikasikan kualitas air dan udara secara interaktif dan serta merta (real time) dalam website KLH dan BLH Daerah; b. Terlaksananya sosialisasi mengenai data tersebut kepada masyarakat terdampak melalui media yang dapat diakses.			
53		Kementerian Lingkungan Hidup		Badan Publik melakukan survey mengenai tingkat kepuasan masyarakat dalam hal respon maupun kualitas akses informasi di Badan Publik terkait;	Th 2014 a. Tersusunnya Daftar Informasi Publik yang dibuat berdasarkan riset mendalam mengenai semua dokumen / informasi yang dikuasai Badan Publik, lengkap dengan verifikasi dokumen; serta mandat peraturan sektoral terpublikasikan dalam website b. K/L terkait di tingkat nasional merespon 80% permohonan informasi dari publik sebagaimana UU KIP	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja dan strategi dalam rangka perumusan Daftar Informasi Publik yang dibuat berdasarkan riset mendalam mengenai semua dokumen / informasi yang dikuasai Badan Publik, lengkap dengan verifikasi dokumen; serta mandat peraturan sektoral terpublikasikan dalam website  812 (2014): a. Tersusunnya Daftar Informasi Publik yang dibuat berdasarkan riset mendalam mengenai semua dokumen / informasi yang dikuasai Badan Publik, lengkap dengan verifikasi dokumen; serta mandat peraturan sektoral terpublikasikan dalam website b. Meningkatnya jumlah tanggapan di tingkat nasional untuk permohonan informasi dari publik ke K/L hingga 80% (amanat UU KIP).		
54		Kementerian Lingkungan Hidup		Implementasi UU KIP dan mandat keterbukaan di UU Sektoral baik dalam hal informasi yang bersifat proaktif maupun reaktif di 50% tingkat provinsi (SKPD terkait LH, Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan di 10 Provinsi)	Tahun 2015 a. SKPD terkait LH, Kehutanan dan Pertambangan di 10 Pemerintah Provinsi merespon 80% permohonan informasi dari publik sebagaimana UU KIP; b. Adanya replikasi terhadap Daftar Informasi Publik tingkat nasional (sektor lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan dan pertambangan) sampai dengan verifikasi dokumen (penajaman dari PERMEN LH No. 6 Tahun 2011) di 10 Provinsi. c. Publikasi dokumen AMDAL, Izin Usaha, dan monitoring dan evaluasi keataan pelaku usaha dalam website 10 Pemerintah Provinsi			
55	Mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan menyangkut lingkungan hidup	Kementerian Lingkungan Hidup		Publikasi informasi mekanisme keterlibatan publik disertai dengan pelibatan dalam proses penerbitan izin AMDAL	Th. 2014 a. Terpublikasinya baseline implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan di tingkat nasional; b. Adanya produk-produk user friendly (mis: infografis, poster, media kampanye publik) mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan yang dipublikasikan kepada masyarakat di lokasi-lokasi yang akan/sedang dalam proses pembuatan AMDAL/izin Lingkungan.  Th. 2015 a. Tersedianya instrumen pemantauan sosial Pelibatan Masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL dan Izin Lingkungan; b. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi implementasi pada poin (a.) dari masyarakat sipil dan dari Pemerintah Daerah;	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja dan strategi untuk pelaksanaan baseline implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan di tingkat nasional, serta publikasinya kepada masyarakat.  812 (2014): a. Terpublikasinya baseline implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan di tingkat nasional. b. Tersedianya produk-produk user friendly (mis: infografis, poster, media kampanye publik) mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan yang dipublikasikan kepada masyarakat di lokasi-lokasi yang akan/sedang dalam proses pembuatan AMDAL/izin Lingkungan.		
<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Bermasalah (Miskin - Disability-Berkebutuhan Khusus)</b>								
56	Mendorong perhatian pemerintah dan publik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas	Kementerian Sosial		Implementasi dan publikasi informasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023	Th 2014 a. Tersusunnya Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023. b. Terlaksananya RAN yang menjadi program 2014. c. Publikasi RAN Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023. d. Beroperasinya sistem informasi online data penyandang disabilitas, termasuk bagaimana penanganannya.  Th. 2015 Implementasi RAN Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja, serta strategi perumusan dan implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023  812 (2014): a. Tersusunnya Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023. b. Terlaksananya RAN yang menjadi program 2014. c. Terpublikasinya RAN Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun 2014-2023. d. Beroperasinya sistem informasi online data penyandang disabilitas, termasuk bagaimana penanganannya.		Usulan : Membuat daerah percontohan dengan menyediakan fasilitas penunjang berupa polisi berbahasa isyarat, petunjuk braille pada berbagai sarana umum, dan kendaraan khusus bagi orang cacat
57	Perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG) melalui pemberdayaan masyarakat	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri & Kementerian Sosial	Publikasi informasi website terkait layanan kesehatan jiwa, serta implementasi program pengembangan komunitas peduli penyandang kesehatan jiwa melalui kerjasama antara pemerintah dengan komunitas publik.	Th. 2014 a. Pengembangan komunitas peduli kesehatan jiwa di 5 Provinsi. b. Publikasi informasi kampanye publik menyangkut informasi kesehatan jiwa di 5 Provinsi.  Th. 2015 a. Pengembangan komunitas peduli kesehatan jiwa di 10 provinsi. b. Publikasi informasi fasilitas layanan kesehatan yang melayani ODG melalui website SIAP Kemenkes. c. Terlaksananya kampanye publik menyangkut informasi kesehatan jiwa di 10 provinsi.	806 (2014): a. Terlaksananya pengembangan komunitas peduli kesehatan jiwa di 3 provinsi b. Terlaksananya kampanye publik menyangkut informasi kesehatan jiwa di 3 provinsi.  812 (2014): a. Terlaksananya pengembangan komunitas peduli kesehatan jiwa di 5 Provinsi. b. Terlaksananya kampanye publik menyangkut informasi kesehatan jiwa di 5 Provinsi.		
58	Pembinaan kaum miskin yang marak di perkotaan melalui sentralisasi lokasi pembinaan	Kementerian Sosial		Implementasi pilot project di "Desaku Menanti" meliputi program pembekalan dan bimbingan sosial serta kemandirian ekonomi agar lebih berdaya, melalui pengelolaan kolaboratif bersama publik (TKSK).	Th. 2014 a. Implementasi pilot project "Desaku Menanti" kepada 35 KK (136 Jiwa) meliputi program pembekalan dan bimbingan sosial serta kemandirian ekonomi agar lebih berdaya, melalui pengelolaan kolaboratif bersama publik (TKSK). b. Publikasi evaluasi implementasi pilot project "Desaku Menanti".  Th. 2015 a. Implementasi pilot project "Desaku Menanti" kepada 35 KK (136 Jiwa) meliputi program pembekalan dan bimbingan sosial serta kemandirian ekonomi agar lebih berdaya, melalui pengelolaan kolaboratif bersama publik (TKSK). b. Publikasi evaluasi implementasi pilot project "Desaku Menanti".	806 (2014): Tersusunnya rencana kerja dan strategi implementasi pilot project "Desaku Menanti" tahun 2014.  812 (2014): a. Terlaksananya pilot project "Desaku Menanti" kepada 35 KK (136 Jiwa) meliputi program pembekalan dan bimbingan sosial serta kemandirian ekonomi agar lebih berdaya, melalui pengelolaan kolaboratif bersama publik (TKSK). b. Terpublikasinya pelaksanaan dan evaluasi implementasi pilot project "Desaku Menanti" di website Kementerian Sosial.		Usulan : Mengumpulkan pengemis seperti yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan memanfaatkan lokasi bernama Desa Binaan (desa pembinaan bagi mantan pengemis yang dikelola oleh LSM dan mahasiswa)
<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Kelestarian Lingkungan Hidup</b>								
59	Mendorong partisipasi publik dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup daerah pesisir	Kementerian Lingkungan Hidup		Penguatan peran komunitas masyarakat dalam pelestarian ekosistem mangrove dengan dan pengenalan alternatif usaha terkait pengembangan kawasan mangrove di 5 daerah pesisir Kab/Kota.	Th. 2014 Pemberdayaan komunitas masyarakat pesisir dalam menjaga /melestarikan mangrove dan pengenalan alternatif usaha terkait pengembangan kawasan mangrove di 5 daerah pesisir Kab/Kota.  Th. 2015 Pemberdayaan komunitas masyarakat pesisir dalam menjaga /melestarikan mangrove dan pengenalan alternatif usaha terkait pengembangan kawasan mangrove di 5 daerah pesisir Kab/Kota.	806 (2014): Terlaksananya sosialisasi tentang rehabilitasi ekosistem mangrove kepada kelompok masyarakat pesisir di 5 daerah pesisir.  812 (2014): Terlaksananya pemberdayaan komunitas masyarakat pesisir dalam menjaga /melestarikan mangrove dan pengenalan alternatif usaha terkait pengembangan kawasan mangrove di 5 daerah pesisir Kab/Kota.		

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06 & B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
	1	2	3	4	5	6	7	8
60	Mendorong partisipasi publik melalui pengembangan kawasan terintegrasi skala mikro	Kementerian Pertanian		Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan komunitas masyarakat dalam kawasan terintegrasi	Th. 2014 a. Klasifikasi daerah yang berhasil pelaksanaan P4S. b. Publikasi proses, keberhasilan, dan contact person P4S melalui website c. Pengoptimalan peran dan fungsi P4S dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program: pemberdayaan komunitas masyarakat untuk membentuk suatu kawasan terintegrasi (berisikan peternakan sapi, perikanan darat, peternakan ayam, produksi biogas, produksi pupuk ataupun pestisida organik) d. Pilot Project di 2 daerah percontohan Th. 2015 a. Klasifikasi daerah yang berhasil pelaksanaan P4S. b. Publikasi proses, keberhasilan, dan contact person P4S melalui website c. Pengoptimalan peran dan fungsi P4S dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program: pemberdayaan komunitas masyarakat untuk membentuk suatu kawasan terintegrasi (berisikan peternakan sapi, perikanan darat, peternakan ayam, produksi biogas, produksi pupuk ataupun pestisida organik), pilot di 10 daerah percontohan	B06 (2014): Terlaksananya klasifikasi daerah yang berhasil pelaksanaan P4S dan dipublikasikan dalam website. B12 (2014): a. Publikasi proses, keberhasilan, dan contact person P4S melalui website b. Pengoptimalan fungsi P4S dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program: pemberdayaan komunitas masyarakat untuk membentuk suatu kawasan terintegrasi (berisikan peternakan sapi, perikanan darat, peternakan ayam, produksi biogas, produksi pupuk ataupun pestisida organik), c. Pilot Project di 2 daerah percontohan		
61	Mendorong pemberdayaan publik dalam pengelolaan sampah/limbah dan wilayah sekitar lokasi pengelolaan sampah	Kementerian Perdagangan		Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Pasar Percontohan	Th. 2014 a. Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk pengolahan sampah di pasar rakyat. b. Penetapan Pasar Agung (Denpasar) sebagai pilot proyek pengolahan sampah Th. 2015 Implementasi pengolahan sampah untuk 3 (tiga) unit pasar rakyat	B06 (2014): Terlaksananya draft SE Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk pengolahan sampah di pasar rakyat. B12 (2014): a. Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk pengolahan sampah di pasar rakyat. b. Ditetapkannya Pasar Agung (Denpasar) sebagai pilot proyek pengolahan sampah		
<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penguatan Sektor Pertanian</b>								
62	Mendorong pemahaman publik tentang pertanian dan pemerataan kualitas petani khususnya daerah tertinggal.	Kementerian Pertanian	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengenalan dunia pertanian pada generasi muda melalui kegiatan pelatihan Agri Training Camp di 10 Balai Pelatihan Pertanian.	Th. 2014 Terselenggaranya program Agri Training Camp di 10 Balai Pelatihan Pertanian, dengan target peserta masing-masing siswa SD, SMP, SMA adalah 30 orang setiap Balai Pelatihan Pertanian Th. 2015 Terselenggaranya program Agri Training Camp di 10 Balai Pelatihan Pertanian; dengan target peserta masing-masing siswa SD, SMP, SMA adalah 30 orang setiap Balai Pelatihan Pertanian	B06 (2014): Terlaksananya Agri Training Camp di 5 Balai Pelatihan Pertanian. B12 (2014): Terselenggaranya program Agri Training Camp di 10 Balai Pelatihan Pertanian, dengan target peserta masing-masing siswa SD, SMP, SMA adalah 30 orang setiap Balai Pelatihan Pertanian		
63	Mendorong kontribusi petani dalam peningkatan kualitas produksi pertanian di wilayahnya	Kementerian Pertanian		Pengoptimalan fungsi Balai Penyuluhan di tingkat Kecamatan sebagai sarana pemberdayaan komunitas pertanian (petani, ahli pertanian, dan pemerintah) untuk merumuskan program baru pertanian.	Th. 2014 Terlaksananya fasilitas balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sebagai posko pembangunan pertanian di 1000 unit. Th. 2015 Terlaksananya fasilitas balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sebagai posko pembangunan pertanian di 1000 unit.	B06 (2014): Terlaksananya fasilitas balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sebagai posko pembangunan pertanian di 1000 unit. B12 (2014): Terlaksananya fasilitas balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan sebagai posko pembangunan pertanian di 1000 unit.		
<b>Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Sektor Kreatif</b>								
64	Mendorong partisipasi publik dalam pemanfaatan ruang khusus melalui keterlibatan dalam wujud kreasi dan pengawasan publik	Kementerian Pemuda dan Olahraga		Terlaksananya penetapan ruang khusus untuk seni grafis dan iklan di lingkungan kota serta pengelolaan ruang iklan.	Th. 2014 Tersusunnya regulasi/peraturan Kemenpora agar daerah menetapkan area/ruang khusus bagi seni grafis dan iklan disertai dengan pengawasan kuat. Th. 2015 Terlaksananya implementasi area/ruang khusus bagi seni grafis dan iklan di 5 daerah percontohan	B06 (2014): Tersusunnya rencana perumusan regulasi/peraturan Kemenpora agar daerah menetapkan area/ruang khusus bagi seni grafis dan iklan disertai dengan pengawasan kuat. B12 (2014): Tersusunnya regulasi/peraturan Kemenpora agar daerah menetapkan area/ruang khusus bagi seni grafis dan iklan disertai dengan pengawasan kuat.		Usulan : Membuat ruang khusus untuk seni grafis dan iklan di lingkungan kota, pengelolaan ruang iklan, mempertegas peraturan pemasangan iklan di luar ruangan
65	Penguatan layanan publik menyangkut pariwisata dan ekonomi kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan wilayah khusus pengembangan batik melalui penetapan sentra industri batik	Th. 2014 Perumusan roadmap pengembangan batik melalui pembentukan sentra batik dan pembangunan portal layanan pengembangan industri batik Th. 2015 Penetapan 2 daerah sebagai sentra pendidikan dan pengembangan batik Indonesia	B06 (2014): Tersusunnya rencana dan strategi perumusan roadmap pengembangan batik . B12 (2014): Dirumuskannya roadmap pengembangan batik melalui pembentukan sentra batik dan pembangunan portal layanan pengembangan industri batik		Usulan : Pendirian Kampung Batik Tempuran sebagai sentra pendidikan dan pengembangan corak batik, penyusunan prototype corak dan motif batik, mematenkan produksi batik dan menjadikannya motif khas Sukoarjo, membangun website atau layanan multimedia.
66				Pengembangan Website dan Mobile Application berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatan-kegiatan wisata.	Th. 2014 a. Terbangunnya website berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatan-kegiatan wisata. b. Terbangunnya Mobile Application berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatan-kegiatan wisata.	B06(2014): 1. Pengkayaan content destinasi pariwisata Indonesia di website promosi pariwisata <a href="http://www.indonesia.travel">www.indonesia.travel</a> 2. Sosialisasi tmg branding pariwisata dan logo "wonderful Indonesia" dimana sudah ada alamat website promosi pariwisata ( <a href="http://Indonesia.travel">Indonesia.travel</a> ) di setiap event nasional dan internasional 3. Pencantuman logo branding wonderful Indonesia di setiap bahan promosi baik cetak, elektronik dan media ruang 4. Bekerjasama dgn unit kerja/instansi lain dgn cara link page website yg sudah banyak traffic nya B12 (2014): Terbangunnya website berisi kebutuhan turis untuk menemukan kegiatan-kegiatan wisata.		